

FENOMENA MADRASAH BUBAR DAN *ISLAMIC FULL-DAY SCHOOL*

(Studi Atas Persepsi dan Aspirasi Masyarakat Muslim Kota Surakarta tentang
Madrasah Ibtidaiyah dan *Islamic Full-day School*)

Fatchurrohman

Abstracts

The birth of Islamic full-day school (SDIT) brings about the direct or indirect effect to the existence of Islamic Elementary Schools. Several schools in Surakarta and its surroundings are lack of students and some of them break up. Based on the observation most of the broken schools were built by the collective societies. Conversely, the integrated schools or the full-day schools were usually established and possessed by private owners; thus, the profit oriented management of such schools are more dominant; even though, this assumption is not absolutely always correct. This article show factors that elicit the broken of Islamic Elementary Schools, for instance: 1) the weakness of curriculum innovation, 2) unqualified teachers' dedication and performance, 3) the weakness of principals leadership, and 4) the school location is mostly not strategic.

There are several factors supporting the establishment of Islamic full-day schools

Penulis lahir di Grobogan, 09 Maret 1971.
Menyelesaikan S1 di Fak. Tarbiyah Jurusan
PAI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995).

Program magister diselesaikan di
Universitas Negeri Yogyakarta Jurusan
Manajemen Pendidikan (2005).

Kini, selain menjadi dosen, ia dipercaya
sebagai Ketua Program Studi Pendidikan
Agama Islam STAIN Salatiga (2006 – 2010)

as follows: 1) the use of *integrated curriculum*, 2) the support of *qualified and professional teachers*, 3) the availability of *sufficient teaching aids*, 4) the effectiveness of *coordination and consolidation of the foundation*. The model of *Islamic Elementary Schools wanted and demanded by societies* are as follows: 1) the full application of *religious and non-religious curricula*, 2) supported by the *qualified and professional teachers*, 3) the availability of *sufficient teaching aids*, 4) the distribution of *school fees among parents, government, and donation*, 5) the existence of *networking among schools, parents, and societies*, 6) they are based by the existence of *Islamic academic culture*.

Keywords: *Islamic Elementary School, Islamic full-day school, integrated (excellent).*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir dekade 1990-an, di Kota Surakarta dan sekitarnya, bermunculan sekolah berbasis keislaman terutama pada tingkat dasar dengan berbagai variasi nama. Hal yang menarik dari sekolah-sekolah Islam tersebut adalah istilah *full-day school*. Mereka menjabarkan istilah *Islamic full-day school* dalam beragam model sekolah seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), SD Islam Unggulan, SD Islam Program Khusus.

Sekolah-sekolah itu sebagian besar tidak didirikan oleh ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah,

NU, Al-Irsyad, yang dianggap berpengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, melainkan didirikan oleh yayasan pendidikan Islam lain yang berkeinginan kuat membuat *image* baru yang lebih baik tentang sekolah Islam. Sekolah-sekolah yang berlabel *full-day* tersebut ternyata cukup mendapat sambutan masyarakat muslim kota Surakarta.

Menurut Heri Sucitro, Kepala SDIT Nur Hidayah Surakarta, hingga saat ini belum ada aturan dan standar khusus yang mengatur penyelenggaraan *full-day school*. Penyelenggaraan pendidikan di *full-day school* yang memberlakukan jam belajar sehari penuh, antara jam 07.00-15.30, merupakan inisiatif penyelenggara sekolah, yang berusaha memadukan konsep pendidikan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

Fenomena munculnya *full-day school* tersebut di sisi lain berdampak pada keberadaan madrasah, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini hukum pasar nampaknya berlaku, yaitu sekolah dan madrasah yang tidak bisa mengikuti keinginan pasar akan semakin ditinggalkan masyarakat.

Kenyataannya, cukup banyak sekolah dan madrasah di kawasan Surakarta dan sekitarnya kekurangan murid, bahkan ada beberapa sekolah dan madrasah yang bubar. Padahal

bila dicermati, sekolah dan madrasah yang bubar tersebut mayoritas didirikan masyarakat secara bergotong royong. Sebaliknya sekolah-sekolah baru yang berlabel “Terpadu” atau “Unggulan” atau “Program Khusus” tersebut mayoritas didirikan dan dimiliki pribadi yang seringkali faktor bisnis cukup menonjol dalam pengelolaannya, meski dugaan terakhir ini tidak sepenuhnya benar.

Sekolah Dasar dengan konsep *full-day school*, selama ini dalam pandangan sebagian besar masyarakat memang diidentikkan dengan lembaga pendidikan Islam dengan kualitas baik, berfasilitas lengkap, bisa memadukan ilmu umum dan agama dan mayoritas berbiaya mahal.

Madrasah selama ini diidentikkan dengan minimnya fasilitas, lebih mengedepankan pendidikan agama dibanding pendidikan umum, kualitas yang diragukan, dan yang masih menonjol adalah lembaga pendidikan dengan biaya murah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan madrasah bubar?
2. Bagaimana model pengelolaan *Islamic full-day school*?

3. Apa persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap madrasah dan *Islamic full-day school*?
4. Bagaimana model madrasah berkualitas yang sesuai dengan aspirasi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab madrasah bubar di Surakarta dan sekitarnya.
2. Mengetahui manajemen *Islamic full-day school*.
3. Mengetahui persepsi dan aspirasi masyarakat muslim kota Surakarta dan sekitarnya terhadap madrasah dan *Islamic full-day school*.
4. Menemukan model madrasah berkualitas sesuai dengan aspirasi masyarakat.

D. Kerangka Teoritik

1. Madrasah

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama, meliputi MI, MTs, MA Mu'alimin, Mu'allimat serta Diniyah. (Ridwan Nasir, 2005: 90)

Madrasah secara *lughawi* berarti sekolah, yaitu tempat belajar. Istilah madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum,

namun di Indonesia ditujukan untuk sekolah-sekolah Islam yang mata pelajaran dasarnya adalah mata pelajaran agama Islam.

Menurut Ali Al-Jumbulati dan Abdul Futuh At-Tuwanisi (2002), secara kelembagaan, madrasah belum muncul sebelum abad keempat Hijriyah atau sepuluh Miladiyah. Lembaga madrasah didirikan pertama kali di kota Naisabur yaitu madrasah al-Baehaqiyah. Madrasah tersebut didirikan karena masjid-masjid telah dipenuhi dengan *halaqah-halaqah* (pengajian) dari para guru dan murid-murid yang semakin berdesakan, sehingga mengganggu orang yang sedang shalat. Halaqah-halaqah tersebut kemudian dipindah ke ruang-ruang seadanya yang didirikan di sekitar masjid. Selain itu, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang ditunjukkan dengan setelah makin berkembangnya kegiatan penerjemahan buku-buku berbahasa asing (non-Arab) ke dalam bahasa Arab membutuhkan tempat yang memadai.

Menurut Mahmud Yunus (1996: 63), dari segi sejarah keberadaan madrasah di Indonesia, pada awalnya pendidikan Islam diadakan di surau-surau dengan tidak berkelas kelas dan tidak memakai bangku, meja, papan tulis, namun hanya duduk bersila saja. Kemudian mulailah perubahan sedikit

demi sedikit sampai sekarang. Pendidikan Islam yang mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja dan papan tulis, adalah Sekolah Adabiah (*Adabiyah School*) di Padang. Inilah madrasah (sekolah Agama) yang pertama di Minangkabau, bahkan di seluruh Indonesia.

Sejak awal berdirinya, madrasah-madrasah di Indonesia hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab (Mahmud Yunus, 1996: 68), ditambah tarikh, akhlaq dan sedikit ilmu bumi. Kitab-kitab yang dipakai adalah kitab-kitab baru kalangan ulama Mesir dan untuk kelas rendah dipakai kitab karangan Zainudin Labay al Yunusi.

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri), yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, semua madrasah mengubah kurikulumnya menjadi 70% bidang studi umum, dan 30% bidang studi agama. Hal tersebut berlaku bagi madrasah yang dikelola oleh Departemen Agama, yaitu madrasah negeri. Madrasah yang dikelola oleh swasta bervariasi dalam mengembangkannya, yakni ada yang 60% bidang studi agama dan 40% bidang studi umum dan ada juga yang 70% bidang studi agama dan 30% bidang studi umum.

Semenjak berlakunya SKB 3 Menteri, semua bidang studi umum dan

keterampilan yang ada di sekolah umum diadopsikan ke dalam kurikulum madrasah, sehingga madrasah sama dengan sekolah umum, hanya saja diberikan 30% lagi bidang studi agama dan bahasa Arab.

Setelah kurang lebih berjalan dua puluh tahun sejak berlakunya SKB 3 menteri, harapan yang dicanangkan semula ternyata tidak tercapai. Guru, sarana, lulusan, pengelolaan dan berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan madrasah secara kualitas dan kuantitas berada di bawah standar sekolah umum. Akibatnya madrasah dianggap sebagai sekolah kelas dua.

Kondisi tersebut dalam jangka panjang mengakibatkan semakin menyusutnya jumlah siswa yang masuk ke madrasah, dan akibat yang fatal adalah ditutupnya madrasah yang bersangkutan.

2. *Islamic full-day school*

Islamic full-day school adalah istilah sekolah dasar Islam yang memberlakukan jam belajar sehari penuh antara jam 07.00 – 15.30 atau 16.00. *Islamic full-day school* merupakan sekolah yang memadukan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Salah satu model *Islamic full-day school* adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) merupakan bentuk satuan

pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun berdasarkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan sistem pendidikan Islam. Model pembelajaran yang dikembangkan adalah melalui pengintegrasian antara pendidikan agama dan umum, antara sekolah, orang tua dan masyarakat, dengan memaksimalkan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekolah Dasar Islam Terpadu bertujuan ingin membentuk peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas, berwawasan luas, kreatif, dan bersikap positif (Dokumen SDIT Nur Hidayah)

Secara historis, prinsip keterpaduan dalam pengelolaan pendidikan Islam sebenarnya telah dimulai pada era tahun 1960-an. Menurut Karel A. Steenbrink (1991: 225), cita-cita integrasi antara sistem sekolah dan madrasah, telah diperjuangkan masyarakat Aceh, oleh kalangan ulama, tokoh masyarakat, kalangan pemerintah non Departemen Agama.

Dalam pertemuan para ulama Aceh pada bulan November 1967, diusulkan agar kurikulum sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah diselaraskan. Pada tahun 1968, Gubernur Aceh mengeluarkan keputusan untuk membentuk sebuah komisi, yang bertugas mewujudkan usul yang dikemukakan dalam pertemuan ulama

tersebut. Menurut instruksi, sekolah harus mendapatkan perhatian khusus, dimana agama diajarkan dalam beberapa jam per minggu. Instruksi tersebut juga menghendaki ditemukannya sebuah metode khusus pengajaran agama dengan pendekatan integratif. Namun pada waktu itu panitia kerja belum mampu melahirkan rumusan konsep yang mendasar atas gagasan prinsip integrasi dan keterpaduan dalam pendidikan agama.

Konsep SDIT yang menjamur sekitar akhir tahun 1990-an barangkali bisa disebut sebagai reaktualisasi dari gagasan para pejuang pendidikan Islam Indonesia terdahulu.

3. *Persepsi*

Menurut Robin (1998: 89), persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Dengan bahasa lain, Griffin (1996: 15) memaknai persepsi sebagai suatu proses dimana individu menerima dan menginterpretasikan informasi yang ada di sekitarnya.

Persepsi individu dipengaruhi oleh individu yang bersangkutan (*perceiver*), objek (*target*), dan situasi (*situation*) dimana persepsi itu dilakukan. Faktor individu antara lain mencakup sikap, motivasi, kepen-

tingan, pengalaman, dan pengharapan; faktor objek antara lain meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan; sedangkan faktor situasi antara lain mencakup pilihan, organisasi, atribusi, *stereotype*, *hallo*, proyeksi.

4. *Aspirasi*

Sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Di era desentralisasi, orang tua dan masyarakat harus diberi peluang yang sebesar-besarnya untuk menyampaikan aspirasinya sebagai wujud partisipasi pengelolaan sekolah. Hal ini didasari keyakinan, bahwa makin tinggi tingkat partisipasi atau aspirasi orang tua dan masyarakat, makin besar pula rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan dedikasinya. (Depdiknas, 2002: 17).

Sebaliknya, sekolah semestinya juga harus menunjang pencapaian tujuan atau kebutuhan orang tua dan masyarakat. Sekolah harus mengetahui dengan jelas kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat terhadap sekolah. Dengan kata lain, hubungan antara sekolah, masyarakat dan orang tua harus dibina dalam suatu jalinan hubungan timbal balik yang harmonis (Mulyasa, 2003: 50)

Aspirasi orang tua dan masyarakat sebagai wujud partisipasi pengelolaan sekolah harus mendapat perhatian serius dari sekolah. Sekolah dapat menggali aspirasi orang tua dan masyarakat melalui forum-forum pertemuan formal dan informal. Menurut Koster (Aan Komariah, 2005: 52), orang tua dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam menentukan kebijakan dan program sekolah, mengawasi pelaksanaan kebijakan sekolah, mengawasi mutu sekolah, mengembangkan iklim sekolah, menentukan kebijakan keuangan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Dengan memperhatikan aspirasi orang tua dan masyarakat, pengelolaan sekolah akan lebih efektif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan diskriptif dan *ex post facto*. Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek studi (Stephen Isaac, 1982: 46) atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan objek studi saat ini (Gay, 1981: 153) Pendekatan diskriptif ini digunakan untuk mengungkap fakta *Islamic full-day school* dengan segala karakteristiknya.

Pendekatan *ex post facto* dimulai dengan mendeskripsikan situasi objek studi sekarang, sebagai akibat dari pengaruh berbagai faktor yang terjadi sebelumnya, kemudian mencoba mengungkap ke belakang guna menetapkan faktor utama penyebab terjadinya situasi sekarang (Arif Furchan, 1982: 384). Pendekatan *ex post facto* digunakan untuk mengungkap faktor-faktor penyebab madrasah bubar yang terjadi pada masa lampau. Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab bubaranya madrasah tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mencari model penyelenggaraan madrasah pada masa mendatang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *stakeholder* madrasah dan *Islamic full-day school*, diantaranya para kepala sekolah, para guru, pengelola yayasan, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat. Jumlah sebaran responden penelitian ini meliputi : (1) unsur Kepala Sekolah dan Guru SDIT berjumlah 8 orang, wali murid SDIT berjumlah 12 orang, tokoh masyarakat berjumlah 14 orang, mantan Kepala MI yang bubar berjumlah 3 orang, wali murid MI bubar berjumlah 10 orang. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah : a) manajemen madrasah dan *Islamic full-day school*, b) persepsi

dan aspirasi orang tua dan masyarakat terhadap madrasah dan *Islamic full-day school*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pengembangan penggalian data dilakukan dengan teknik *snowballing*, yaitu dengan melacak informasi terhadap informan yang lain berdasarkan informasi dari *key informan*. Pelacakan informasi dihentikan jika telah sampai pada titik jenuh, artinya informasi tidak berkembang lagi, tidak bervariasi.

Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan para guru di *Islamic full-day school*. Observasi juga dilakukan terhadap lokasi dan *academic atmosphere* di *Islamic full-day school* yang diciptakan untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Dalam mengobservasi, peneliti tidak mesti terlibat dalam kegiatan pembelajaran.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan manajemen madrasah dan *Islamic full-day school*. Dokumen tersebut diantaranya kurikulum, administrasi guru, administrasi kesiswaan, administrasi kepala sekolah, catatan akademik siswa dan dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, yaitu dengan mengambil beberapa madrasah dan *Islamic full-day school* yang dianggap mewakili heterogenitas karakteristik wilayah penelitian. Demikian juga penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling* yang dianggap dapat mewakili heterogenitas karakteristik subjek penelitian dalam berbagai kluster terutama para wali murid; misalnya dari segi pekerjaannya meliputi pegawai negeri, swasta, tingkat ekonomi tinggi, sedang, dan rendah dan seterusnya.

5. Pemeriksaan Kredibilitas Data

Untuk memeriksa kredibilitas data digunakan teknik ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat (Moleong, 2002: 175). Teknik triangulasi dilakukan dengan pengecekan silang melalui metode dan sumber. Triangulasi metode dilakukan melalui metode yang berbeda untuk data yang sama, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan cek silang pada sumber yang berbeda untuk suatu data. Pengecekan sejawat dilakukan melalui diskusi analitik atas data, temuan di lapangan dan hasil penelitian dengan rekan sejawat yang dipandang kompeten dalam penelitian

kualitatif dan tema persoalan. Diskusi analisis sejawat ini dimaksudkan untuk mempertahankan keterbukaan dan kejujuran, dan untuk menjajagi kebenaran analisis pemikiran peneliti atas data temuan di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis diskriptif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994: 10). Analisis ini terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

II. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tujuh sekolah, yang terdiri dari tiga *Islamic full-day school* dan empat Madrasah Ibtidaiyah yang telah bubar, yaitu:

- a. SDIT Nur Hidayah, Kerten, Laweyan, Surakarta.
- b. SDIT Muhammadiyah Al Kautsar, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo.
- c. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIP) Al Madinah, Kartasura, Sukoharjo.
- d. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Palur, Mojolaban, Sukoharjo.
- e. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Dagas, Polokarto, Sukoharjo.
- f. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo.

- g. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo.

Dalam pembahasan ini, akan dikupas tentang berbagai hal yang terkait dengan komponen-komponen utama pendidikan di sekolah, yang menyangkut kurikulum, tenaga kependidikan, biaya, sarana, orang tua, hubungan masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah, pembinaan lembaga terkait, mutu pendidikan, dan alasan orang tua menyekolahkan anaknya. Pembahasan ini mungkin terkesan membandingkan, namun sebenarnya merupakan gambaran kondisi riil terakhir ketika lembaga tersebut masih eksis.

A. Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan di MI sebagian besar adalah kurikulum murni Depag. Ada beberapa MI yang menambahnya dengan kurikulum yayasan sebagai suplemen dan ciri khusus MI yang bersangkutan, seperti kemuhammadiyah. Kurikulum ciri khusus ini sifatnya tidak untuk menambah kualitas unggulan lulusan, namun lebih ditekankan pada pewarisan ideologi pergerakan bagi para kader. Penambahan kurikulum ciri khusus ini merupakan hal yang wajar bagi lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan tertentu.

Para pengelola MI kurang berinisiatif untuk mengembangkan kurikulumnya dengan memberi muatan-muatan tambahan sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Dalam praktiknya, kurikulum di MI baru dilaksanakan sebatas pengajaran tatap muka di kelas terutama materi-materi pendidikan agama, walaupun ada yang sudah mengarah pada kegiatan pendidikan namun porsinya masih sedikit, seperti di MI Dugas ada kegiatan sholat berjama'ah di Masjid setiap Duhur.

Dalam kegiatan pengajaran, metode yang dikembangkan belum mengarah pada penggalian potensi anak. Dalam berbagai wawancara, tidak muncul ungkapan tentang metode pembelajaran, kecuali yang biasa diterapkan yaitu ceramah. Pendekatan kontekstual dan *problem solving*, *problem posing* kurang mendapat perhatian dalam praktik pembelajaran di MI. Akibatnya pengajaran menjadi kurang menarik dan agama terasa jauh dari kehidupan anak didik.

Sementara itu kalau dilihat di *Islamic full-day school*, kurikulumnya dinamis dikemas sedemikian rupa sebagai bentuk riil mensikapi dinamika sosial dan untuk menarik anak didik. Pengembangan kurikulum *Islamic full-day school* bervariasi sesuai

dengan karakter lokal dan ciri khusus yayasan penyelenggaranya. Muatan tambahan yang dijumpai pada sebagian besar *Islamic full-day school* adalah adanya program tahfidz meskipun masing-masing sekolah targetnya berbeda-beda, ada yang 3 juz seperti di SDIT Nur Hidayah, ada juz 'amma seperti di SDIT al Kautsar. Program tahfidz ini dimaksudkan sebagai upaya menunjukkan keunggulan sekolah menyiapkan kader-kader Islami mendatang.

Pengembangan kurikulum pada *Islamic full-day school* dengan penambahan muatan pelajaran diikuti dengan penambahan jam belajar, antara 2 sampai 4 jam, ada yang pulang jam 14.00 ada juga yang pulang jam 16.00. Penambahan jam belajar inipun juga diikuti dengan pengembangan metode dan pendekatan kegiatan pembelajaran. Pengembangan metode pembelajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi kejenuhan anak didik dan untuk mencapai target-target tambahan yang dicanangkan.

Dalam praktiknya, kurikulum di *Islamic full-day school* tidak hanya berutat pada kegiatan pengajaran. Kegiatan bimbingan dan latihan mendapat porsi yang berimbang dengan kegiatan pengajaran. Hal ini dapat dilihat dari adanya guru pendamping yang membawahi sekitar sepuluh anak. Guru pendamping ini bertugas

membimbing dan melatih, mengawasi perkembangan anak.

Dilihat dari muatan materinya, kurikulum di *Islamic full-day school* disajikan dalam kemasan materi praktis dan aplikatif. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sekaligus memudahkan pemahaman anak terhadap materi-materi keagamaan.

B. Tenaga Kependidikan

Sebagian besar tenaga kependidikan di MI khususnya guru adalah pegawai negeri sipil, seperti di MI Palur, MI Ngemplak, MI Gumpang, ataupun MI Dugas. Tenaga guru yang berstatus pegawai negeri sipil ini lebih menguntungkan MI dari segi penggajian. Beban keuangan MI yang bersangkutan lebih ringan karena hanya tinggal memikirkan gaji 1 atau 2 orang guru honorer.

Namun di sisi lain, kenyataannya status pegawai negeri sipil itu tidak diikuti dengan etos kerja dan disiplin akademik yang semestinya. Status pegawai negeri yang dijamin pemerintah gajinya, membuat mereka bekerja apa adanya, yang penting masuk kerja. Status pegawai tetap dengan gaji tetap menjadikan mereka miskin inovasi dan kreativitas, karena apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah status mereka. Hal ini ditemui di MI

Gumpang, MI Palur, sebagian MI Ngemplak dan MI Dugas. Apalagi dijumpai ada guru agama MI yang kurang mempunyai komitmen moral yang tinggi membuat masyarakat tidak percaya dengan pendidikan di MI, seperti terjadi di MI Gumpang.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, para guru di MI sebagian besar adalah berpendidikan ujian persamaan UGA. Mereka diangkat ketika Pemerintah membutuhkan banyak tenaga guru, sementara stok guru pada waktu itu kurang, akhirnya 'siapa saja' yang mau menjadi guru agama diikutkan dalam ujian persamaan UGA. Hal ini terjadi sekitar tahun 1960-an.

Dampak negatif dari kebijakan tersebut baru dirasakan sekarang, di mana guru-guru yang sebagian besar angkatan UGA usianya sudah lanjut, sehingga mereka kewalahan untuk mengikuti perkembangan dinamika sosial dan perkembangan berbagai kebijakan dalam dunia kependidikan, walaupun ada sebagian yang mampu mengikutinya. Mereka juga terlihat kesulitan untuk mengkombinasikan penguasaan didaktik metodiknya dengan model pembelajaran sekarang, seperti model *Quantum*, *Active learning*, *Cooperative learning*, *Learning by fun*. Akibatnya model pembelajaran sekarang tidak berbeda dengan model yang dikembangkannya tahun 1960-an.

Berbeda fenomenanya di *Islamic full-day school*, sebagian besar tenaga guru di *Islamic full-day school* adalah guru swasta, bukan pegawai negeri sipil dan semua *Islamic full-day school* berstatus swasta. Status swasta, baik sekolah maupun gurunya ternyata mereka pahami secara positif, artinya mereka harus mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Besar kecilnya lembaga dan dirinya tergantung pada kerja kerasnya, semakin dia bekerja keras maka peluang untuk hidup subur semakin tinggi, namun jika mereka tidak serius dalam bekerja maka peluang untuk matinya lembaga lebih besar. Oleh karena itu mereka saling berlomba untuk berinovasi dan berkreaitivitas dalam upaya mewujudkan keunggulan diri dan lembaganya yang akan berbuntut pada harga jual di pasaran.

Di lihat dari tingkat pendidikannya, sebagian tenaga guru di *Islamic full-day school* berpendidikan sarjana. Hal ini terjadi karena menjamurnya *Islamic full-day school* stok tenaga guru di lapangan cukup melimpah, sehingga penyelenggara dapat melakukan seleksi yang begitu ketat untuk mendapatkan tenaga guru yang diinginkan. Seperti yang terjadi di SDIT al Kautsar, mereka membutuhkan empat tenaga guru, mereka memasang iklan di media masa, dan di luar dugaan pendaftaranya

sekitar 250-an orang. Dengan jumlah pendaftar guru yang melimpah, maka penyelenggara dapat melakukan seleksi secara leluasa, baik performa ataupun *special skill* nya.

Dari segi usia, mereka rata-rata masih muda, mempunyai semangat kerja dan semangat juang yang tinggi. Mereka adalah tenaga-tenaga muda yang membutuhkan media aktualisasi diri setelah baru lulus dari dunia pendidikan. Potensi tenaga muda itulah yang kemudian dimanaj oleh para pengelola *Islamic full-day school* untuk mengelola suatu lembaga pendidikan. Status tenaga guru swasta itu juga memberi keleluasaan yayasan pengelola untuk memecat mereka jika dipandang performa mereka tidak sesuai dengan visi dan misi lembaga.

C. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan di MI sangat murah, hal ini diakui oleh beberapa wali murid dan para tokoh masyarakat, bahkan ada MI yang gratis beberapa tahun pertama seperti yang terjadi di MI Dagas. Kebijakan rendahnya tarikan SPP bagi para murid ini dimungkinkan ada empat faktor, yakni: (1) pihak sekolah menyadari bahwa sebagian besar murid-muridnya berasal dari keluarga kurang mampu, (2) sekolah tidak mempunyai inisiatif kegiatan lain di luar kegiatan pembelajaran di

kelas yang membutuhkan pembiayaan, (3) gaji guru sudah dicukupi oleh Depag, (4) semua kegiatan sekolah sudah didanai oleh Depag.

Rendahnya pembiayaan pendidikan di MI menimbulkan efek positif dan negatif. Efek positifnya antara lain, (1) tidak memberatkan wali murid, (2) minat orang tua menyekolahkan anaknya tinggi, (3) terhindar dari kesan komersialisasi pendidikan, (4) pembayaran keuangan sekolah sering terlambat, apalagi kalau sekolah yang bersangkutan toleransinya tinggi. Efek negatifnya, (1) wali murid terbiasa dengan biaya murah, sehingga kalau ada inovasi kegiatan yang melibatkan pembiayaan orang tua akan sulit dilaksanakan, (2) kegiatan sekolah tidak bisa berkembang, macet, (3) biasanya etos kerja lemah, seadanya, (4) pembayaran keuangan sekolah yang telat mengganggu aktivitas sekolah

Sebagian besar MI mengandalkan pembiayaan dari Depag dan SPP anak. Mereka kurang mempunyai inisiatif untuk mencari sumber-sumber dana lain yang halal untuk menopang operasional kemajuan sekolah. Pengelola MI lebih memilih sikap '*qona'ah*' dalam hal jatah keuangan. Ada juga MI yang mempunyai inisiatif untuk mencari donator, seperti di MI Gumpang, namun masih sebatas pengurus Yayasan.

Fenomena pembiayaan pendidikan di *Islamic full-day school* agaknya berbeda. *Islamic full-day school* tidak menerapkan 'biaya murah' dalam penyelenggaraan pendidikannya, namun menerapkan pembiayaan pendidikan dengan model subsidi silang. SPP tidak ditentukan secara seragam, namun sekolah hanya menentukan standar minimal. Istilah yang dipakai juga tidak sama, ada sekolah yang menggunakan istilah *infaq*, seperti di SDIP al Madinah, Sukoharjo.

Islamic full-day school tidak menerapkan biaya pendidikan murah, dimaksudkan untuk menggugah kesadaran orang tentang arti penting pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua yang berada diajak untuk menyantuni kepada anak-anak yang potensial namun secara ekonomi mereka kurang diuntungkan. Orang tua juga diajak untuk memahami bahwa membiayai anak-anaknya yang sekolah adalah bagian dari amal sholeh yang nantinya akan mendapat pahala dari Allah di akherat kelak. Orang tua juga diajak berpikir rasional, logis, bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas juga dibutuhkan dana yang seimbang. Orang tua juga diajak berpikir profesional, artinya bahwa seseorang akan dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik dan maksimal manakala tercukupi kebutuhan hidupnya.

Ternyata, model tersebut cukup berhasil. Orang tua SDIT sudah banyak yang menyadari akan arti penting membiayai pendidikan anak-anaknya. Sebagian besar mereka merasa tidak keberatan dengan kebijakan pembiayaan sekolah anak-anaknya, selama pendidikan anak-anaknya 'dijamin' berkualitas. Para orang tua sudah berpikir tentang mutu, kualitas, bukan hanya berpikir tentang biaya yang 'mahal'. Soal keuangan bisa dicari, bisa dipikir, namun mereka tidak mau berspekulasi tentang masa depan pendidikan anak-anaknya.

D. Sarana

Sarana pendidikan yang ada di berbagai MI bervariasi. MI Dugas sangat minim fasilitasnya, hanya ada mesin ketik, meja dan kursi, beberapa buku perpustakaan. MI Palur dan MI Gumpang sudah cukup lengkap, dan MI Ngemplak kondisinya lebih baik daripada MI Dugas. Namun lengkapnya fasilitas ternyata tidak secara otomatis diikuti dengan proses pembelajaran dan output yang berkualitas. Ada faktor lain yang berpengaruh dalam mewujudkan proses dan output yang berkualitas, yakni guru. MI Palur dan MI Gumpang yang dipandang cukup berkualitas ternyata tidak mampu mempertahankan eksistensinya.

Hal ini dibuktikan ketika peneliti melakukan observasi terhadap keadaan MI, ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara sarana fisik dengan kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Misalnya di MI Palur, MI Gumpang, dan MI Ngemplak, ketiga MI ini kondisi gedungnya cukup bagus, bentuk gedungnya sudah permanen, letaknya di pinggir jalan, alat-alat pembelajarannya cukup lengkap. MI Dugas, kondisi gedungnya masih bagus, peralatan tidak ada, letak di pinggir kali. Letak MI Dugas dipinggir kali, ada sebagian orang tua yang memperlmasalahkan, namun juga ada sebagian orang tua yang tidak mempersoalkan letak sekolah itu. Ada sebagian orang tua di daerah Dugas yang mengemukakan alasan tidak menyekolahkan anaknya karena letaknya di pinggir kali, sering banjir. Namun itu hanya sebagian kecil.

Kondisi di *Islamic full-day school* sangat berbeda. Sebagian besar SDIT sudah memiliki gedung yang sangat representatif dengan dilengkapi sarana pendidikan yang memadai, seperti di SDIT Nur Hidayah dan SDIT al-Kautsar. Sementara itu, di SDIP al-Madinah tidak begitu menonjolkan fasilitas pendidikan yang 'mewah'. Pengelola SDIP al Madinah ingin berbeda dengan model-model SDIT yang ada, dan ingin mengikis kesan bahwa

sekolah mutu harus mahal. Ketika peneliti ke SDIP al Madinah, dijumpai bangunan gedung yang sederhana, fasilitas pendidikan yang sederhana, lokasi yang 'kurang strategis'. Namun, kesederhanaan itu tidak menghalangi SDIP al Madinah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

E. Orang tua

Sebagian besar wali murid MI berasal dari keluarga ekonomi lemah dan berpendidikan rendah. Mereka adalah para petani, buruh, pekerja pabrik dan pekerja kasar lainnya. Mereka sebagian besar berpendidikan SD dan bahkan tidak sekolah. Hal ini bukan berarti menyudutkan keberadaan kaum lemah, namun kenyataannya latar belakang ekonomi dan pendidikan orang tua berpengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya. Kehidupan keberagamaan orang tua MI variatif ada yang taat, dan ada juga yang tidak taat.

Ada sebagian orang tua yang tidak mempunyai visi pendidikan, misalnya: "... anaknya yang penting sekolah di manapun terserah *ndak* masalah". Akibatnya yang penting anaknya lulus, tanpa mempedulikan kualitas dan proses pendidikannya. Orang tua yang lemah dalam ekonominya, membuat pihak sekolah 'sungkan' untuk berembug dengan orang tua masalah kegiatan sekolah yang membutuhkan

pendanaan. Hal ini seperti dijumpai di MI Dagas dan MI Ngemplak. Akhirnya sekolah tidak banyak berinisiatif mengadakan kegiatan yang membutuhkan tambahan pendanaan dari para orang tua. Sementara itu, pihak MI juga tidak mempunyai inisiatif untuk mencari sumber dana lain (donator) dan atau mengembangkan model subsidi silang bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan pendidikan di MI.

Sementara itu kondisi orang tua di *Islamic full-day school* sangat berbeda sekali. Sebagian besar orang tua muridnya berasal dari kalangan berpendidikan dan ekonomi menengah ke atas. Mereka mempunyai visi dan tingkat kesadaran yang lebih tinggi tentang pendidikan anak-anaknya, ditopang dengan kemampuan pendanaan yang cukup. Sekolah tidak lagi 'sungkan' untuk membicarakan kegiatan yang membutuhkan partisipasi pendanaan dari para orang tua.

Dilihat dari keberagamaan para wali di *Islamic full-day school* sangat variatif, namun sebagian besar berasal dari keluarga yang taat beragama. Latar belakang keagamaan orang tua ini ternyata sangat mendukung sekali terhadap proses pendidikan yang dijalankan di sekolah. Program-program pendidikan keagamaan di *Islamic full-day school* dengan mudah mendapat dukungan positif dari para orang tua,

sehingga pembinaan anak menjadi lebih utuh.

F. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat yang dikembangkan di MI dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas pengurus dan yayasan, yaitu pengajian-pengajian di berbagai masjid. Melalui pengajian-pengajian tersebut para pengurus memperkenalkan dan mempromosikan MI kepada masyarakat luas. Hal ini seperti yang terjadi di MI Palur dan MI Gumpang. Sosialisasi juga dilakukan dari orang ke orang dan melalui kepengurusan yayasan, seperti yang terjadi di MI Dagas.

Sosialisasi *Islamic full-day school* selain di tempuh dengan cara sebagaimana yang terjadi di MI, juga dikemas dalam kegiatan yang inovatif. Mereka bersosialisasi dari TK ke TK untuk memperkenalkan keunggulan sekolahnya. Mereka juga mengadakan kegiatan yang 'layak dijual' kemudian mengadakan *press release* untuk mempublikasikannya. Hal ini dilakukan dengan pemikiran, bahwa publikasi lewat media masa dipandang efektif dari pada hanya dari orang ke orang. Model ini seperti yang dilakukan oleh pengelola SDIT Nur Hidayah..

G. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Model kepemimpinan sekolah di MI ada yang mengembangkan model

kepemimpinan otoritatif, artinya kepala sekolahlah yang berinisiatif dan memegang kebijakan kelembagaan. Berbagai kebijakan sekolah diputuskan atas inisiatif kepala madrasah. Seperti yang terjadi di MI Dagas, kepala sekolah adalah pemegang dominasi otoritas di sekolah, sampai-sampai operasional sekolah dibiayai dari gajinya sendiri. Hal ini dilakukan karena kebijakannya kurang mendapat dukungan pihak lain, baik guru ataupun masyarakat.

Berbeda halnya yang terjadi di MI Palur, kepala sekolah yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Dia hanya secara formal di SK kan sebagai kepala, namun tugas dan kewajibannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kepala sekolah kurang wibawa di mata para guru, sehingga tidak dipatuhi bawahannya, terlepas dari karakter para guru yang dianggap 'tidak mempunyai komitmen' terhadap tugas dan kewajibannya.

Fenomena di MI Ngemplak berbeda lagi, kepala MI Ngemplak sudah melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan. Pelibatan orang tua tersebut dilakukan melalui rapat-rapat sekolah yang menyangkut kepentingan anak didik. Orang tua dianggap perlu dilibatkan karena mereka adalah salah satu *stakeholder* yang harus selalu bermitra dengan pihak sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah di *Islamic full-day school* lebih banyak mengembangkan model kepemimpinan partisipatif, artinya selalu melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Model kepemimpinan partisipatif ini ternyata melahirkan dukungan yang kuat dari para pihak terkait terhadap pelaksanaan keputusan bersama.

H. Pembinaan Lembaga Terkait

Pembinaan madrasah lebih banyak dilakukan oleh yayasan penyelenggara pendidikan. Yayasan merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan madrasah yang didirikannya, seperti yang terjadi di MI Palur, MI al-Kautsar, MI Ngemplak dan MI Dagas. Semua MI tersebut adalah MI swasta di bawah naungan yayasan Muhammadiyah. Pembinaan yayasan terkait dengan manajemen sekolah, pengalihan dana, pembinaan kepegawaian, pengembangan sarana prasarana dan berbagai persoalan persekolahan terkait. Sebagian besar yayasan proaktif dalam membina madrasahnyanya.

Sementara itu dari Departemen terkait, dalam hal ini Departemen Agama, dirasa kurang peduli terhadap MI-MI-nya. Pembinaan dari Departemen Agama yang menyangkut manajemen, ketenagaan, pendanaan dan hal-hal terkait tidak pernah dilakukan. Bentuk pembinaan selama ini dalam

bentuk penataran-penataran terkait dengan kemampuan tugas-tugas formal keguruan di kelas. Hal tersebut dirasakan oleh pengelola MI Palur, MI Gumpang, MI Ngemplak dan MI Dagas. Departemen Agama hanya mengedrop guru-guru agama, setelah itu dilepas begitu saja. Padahal di tengah persaingan yang ketat antar lembaga pendidikan, Departemen Agama mestinya dapat memainkan perannya sebagai departemen pembina yang mendampingi lembaga-lembaga pendidikan naungannya dalam mengembangkan diri untuk memperkuat eksistensinya.

Setelah beberapa MI yang bubar berubah menjadi SDIT berarti ada alih fungsi departemen Pembina, yang semula MI di bawah naungan Depag setelah menjadi SDIT di bawah naungan Depdiknas. Para pengelola SDIT mengakui adanya perbedaan yang mencolok ketika di bawah naungan Depag dan di bawah naungan Depdiknas. Mereka sekarang di bawah naungan Depdiknas merasa 'tentrem dan ayam' karena punya 'Bapak' yang selalu memperhatikan dirinya. Depdiknas dirasakan lebih serius dalam menangani lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya.

I. Mutu Pendidikan

Pada masa jayanya, MI – MI yang bubar sebenarnya cukup berkualitas. Hal ini diindikasikan dengan diterima-

nya lulusan MI di berbagai sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat. Lulusan MI juga banyak yang 'jadi orang', dosen, dokter, insinyur, guru, bisa studi lanjut ke luar negeri dan berbagai profesi lain yang sejajar dengan lulusan pendidikan sejenis. MI-MI yang bubar pada masa jayanya juga pernah menjuarai berbagai lomba di tingkat Kabupaten, seperti yang pernah di raih MI Dagas, MI Ngemplak, MI Palur dan MI Gumpang. Orang tua, tokoh masyarakat, dan pendiri mengakui akan prestasi yang pernah diraih MI-MI tersebut pada masa itu.

Sementara itu kualitas lulusan *Islamic full-day school* diakui cukup bagus oleh berbagai pihak. Hal ini diindikasikan dengan performa para siswanya ketika baru masuk beberapa waktu di *Islamic full-day school* sudah mempunyai kemampuan yang 'menggumkan', seperti mampu membaca al Quran dengan fasih, hafal do'a – do'a pilihan, mempunyai sopan santun yang baik, berani menegur orang tua jika dipandang menyalahi etika agama.

J. Alasan Menyekolahkan

Ada banyak alasan yang dikemukakan para orang tua menyekolahkan anaknya di MI. *Pertama*, karena ingin anaknya menjadi anak yang sholeh; *kedua*, karena biayanya murah; *ketiga*, asal sekolah; *keempat*, karena ingin anaknya menguasai ilmu-ilmu agama

dan ilmu-ilmu umum. Kalau diprosentasi, sebagian besar para orang tua menyekolahkan anaknya di MI karena ingin anaknya mempunyai kemampuan ilmu agama dan umum yang seimbang. Hal ini bisa dipahami, bahwa sebenarnya kesadaran orang tua akan pendidikan anaknya sudah cukup baik. Potensi kesadaran para orang tua tersebut, sebenarnya merupakan kekuatan penyangga kekuatan eksistensi madrasah. Namun kekuatan tersebut sirna begitu saja, sejalan dengan munculnya berbagai sekolah yang memberi harapan akan tercapainya cita-cita orang tua tersebut. Munculnya berbagai *Islamic full-day school* dengan beragam inovasi dan kemasan, membuat para orang tua mengalihkan perhatian kepadanya yang semula ke MI.

Alasan para orang tua di *Islamic full-day school* tidak jauh berbeda dengan para orang tua yang menyekolahkan anaknya di MI. Mereka ingin anaknya menguasai ilmu agama dan umum yang seimbang dengan pelayanan yang terjamin. Namun yang paling penting bagi para orang tua di *Islamic full-day school* adalah keberagaman anak-anaknya tidak sebatas mempunyai pengetahuan agama, namun juga terlihat dalam amal kesehariannya. Ini yang paling penting!

Keberadaan suatu lembaga pendidikan merupakan cerminan dari

struktur dan ideologi masyarakat tertentu. Kehadiran Madrasah Ibtidaiyah dan *Islamic full-day school*, tidak bisa lepas dari konteks zaman dan tantangannya. Madrasah Ibtidaiyah menjamur sekitar tahun 1960-1970-

hidan masyarakat muslim. Muatan-muatan kurikulum Madrasah dikemas dengan menonjolkan aspek religiusitas sebagai upaya menangkal dakwah kaum atheis.

Tabel 1. Keadaan MI dan Islamic Full-day School

No	Aspek Kelembagaan	Madrasah Ibtidaiyah	<i>Islamic full day school</i>
1	Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> • Muatan materi • Model pembelajaran • Kemasan materi 	Depag Agama dan umum Klasikal, <i>lecturing</i> Teoritik	Modifikasi Depag, Diknas, yayasan, lokal Umum dan agama Klasikal, individual, <i>active learning, learning by fun</i> Praktis aplikatif
2	Tenaga Guru <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Usia • Etos kerja • Status kepegawaian 	Persamaan UGA Di atas 40 tahun Rendah Pegawai Negeri Sipil	Sarjana Di bawah 40 tahun Tinggi, Swasta
3	Orang tua <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pekerjaan • Keberagaman • Tingkat ekonomi 	SD Buruh, tani Variatif, aktif-kurang aktif Menengah ke bawah	Sarjana Wiraswasta, PNS Variatif, aktif Menengah ke atas
4	Sarana / media	Sebagian besar tidak ada	Sebagian besar ada
5	Humas	<ul style="list-style-type: none"> • Lewat pengajian • Kunjungan ke rumah • Melalui pengurus yayasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lewat sekolah-sekolah • Lewat kegiatan • Melalui media masa
6	Pembinaan lembaga terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan • Depdiknas

an yang mengalami masa emasnya pada tahun 1980-an merupakan fenomena zaman. Kehadiran Madrasah Ibtidaiyah pada waktu itu merupakan buah karya komunitas 'santri' sebagai bentuk perlawanan riil atas komunitas 'abangan' yang mulai mengajarkan ideologi atheis, sehingga Madrasah dikemas dalam bentuk sedemikian rupa dalam rangka penguatan ketau-

Sementara itu, kehadiran *Islamic full-day school* merepresentasikan cerminan komunitas muslim 'moderat'. Tantangan zaman sekarang adalah tantangan teknologi dan ideologi sekularisasi. Tantangan teknologi melahirkan kesadaran di kalangan orang tua untuk mensosialisasikan sadar teknologi pada anak-anak mereka sedini mungkin, yang berimplikasi pada

pemilihan sekolah yang *'melek'* teknologi. Sedangkan untuk mengatasi tantangan ideologi sekular, para orang tua menginginkan anaknya sekolah di lembaga pendidikan yang dapat menjamin keunggulan spiritual dan keluhuran akhlak.

Kehadiran *Islamic full-day school* merupakan jawaban atas keresahan orang tua akan tantangan teknologi dan ideologi sekuler. Model *Islamic full-day school* dikemas sedemikian rupa, dengan penonjolan pada aspek teknologi dan religiusitasnya. Sehingga mendapat sambutan yang positif dari masyarakat luas, terutama kalangan muslim menengah ke atas yang tingkat kesadaran teknologi dan tantangan sekularisasi relatif lebih tinggi. Seiring dengan semakin menguatnya kesadaran teknologi masyarakat luas, maka *Islamic full-day school* tidak lagi akan identik dengan komunitas menengah ke atas saja, tetapi *'milik'* semua lapisan masyarakat muslim.

K. Model MI Berkualitas

Setelah menyimak pemaparan tentang fenomena madrasah bubar dan *Islamic full-day school*, kiranya dapat ditawarkan alternatif model madrasah yang bermutu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Model Madrasah Ibtidaiyah tersebut adalah tawaran untuk model

Madrasah Ibtidaiyah sekarang, dimana kecenderungan teknologi masyarakat semakin menguat. Ketika hal tersebut terjadi, maka Madrasah mestinya didesain sedemikian rupa agar dapat memenuhi keinginan masyarakat muslim luas. Di samping itu, lembaga pendidikan Islam mestinya juga memelopori upaya penguatan kesadaran teknologik yang selama ini *'menghilang'* dari komunitas muslim dengan tetap menonjol karakter kemadrasahannya.

Dengan model tersebut, dimungkinkan terjadi penguatan lulusan Madrasah pada aspek IMTAQ dan IPTEK. Lulusan Madrasah tidak lagi dipandang sebelah mata; Madrasah tidak lagi dipandang sebagai sekolah *'agama'* yang hanya mengurus soal keakheratan saja, tetapi Madrasah mampu menjadi *agent of social change* dan agen pembaharuan peradaban.

Model MI tersebut dapat digambarkan sebagaimana tampak dalam gambar 2 di bawah ini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyimak pemaparan hasil penelitian tentang Fenomena Madrasah bubar dan *Islamic full-day school* di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Tabel 2. Beberapa Aspirasi Masyarakat tentang Madrasah yang Bermutu.

No	Aspek Kelembagaan	Aspirasi Masyarakat
1	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Materi agama dan umum seimbang • Dikemas dalam bentuk yang praktis dan aplikatif • Ada pendampingan untuk memantau perkembangan keberagaman anak didik • Proses pembelajarannya berkualitas • Ada materi unggulan, misalnya Bahasa Inggris, Bahasa Arab
2	Tenaga Guru	<ul style="list-style-type: none"> • Berkualitas • Professional dalam bidangnya • Disiplin • Kreatif • Inovatif
3	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> • Ada media pembelajaran
4	Budaya akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Islami
5	Pembiayaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Orang tua • Donator
6	Bentuk kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kerja sama antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat

1. Madrasah

- a. Para pengelola madrasah kurang mempunyai inisiatif untuk mengembangkan kurikulum sekolah. Mereka cenderung menunggu petunjuk atasan dalam menjalankan tugas-tugas persekolahan. Model kegiatan pembelajaran di MI juga masih konvensional.
- b. Etos kerja para guru agama di lingkungan Departemen Agama sangat memprihatinkan. Mereka tidak mampu menegakkan disiplin akademik dan kreativitas akademik.
- c. Tidak adanya peremajaan yang signifikan bagi guru-guru agama

- d. Pembinaan pengembangan madrasah lebih banyak dilakukan oleh yayasan pendiri madrasah. Departemen Agama belum dapat menjalankan tugasnya sebagai pembina madrasah dengan baik.
- e. Penyebab madrasah kurang diminati masyarakat dan akhirnya bubar bervariasi, hal tersebut dapat disimak pada tabel di bawah ini. Urutan-urutan item menunjukkan tingkat dominasi penyebab madrasah kurang diminati masyarakat dan akhirnya bubar.

2. *Islamic Full-day School*

- a. Kurikulum yang dikembangkan di *Islamic full-day school* adalah modifikasi kurikulum MI (Depag), Depdiknas, yayasan dan lokal. Kurikulum tersebut dikemas dalam bentuk muatan materi pembelajaran yang praktis dan aplikatif dengan pendekatan *learning by fun*.
- b. Daya inovasi dan kreativitas para pengelola *Islamic full-day school* cukup tinggi dalam berbagai aspek persekolahan, misalnya kurikulum, pembelajaran, sosialisasi, pembiayaan. Mereka memiliki disiplin, kreativitas akademik, dan semangat juang yang tinggi untuk memajukan lembaganya.
- c. Depdiknas sangat berkepentingan untuk membina lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya, termasuk SDIT.

B. Rekomendasi dan Saran-saran

- a. Para penyelenggara pendidikan harus mampu memahami kultur dan ideologi masyarakat. Kultur dan ideologi suatu masyarakat berkorelasi positif terhadap eksistensi sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang eksis adalah lembaga pendidikan yang mampu memahami kultur dan ideologi masyarakat. Ketika kultur dan ideologi masyarakat berubah, maka lem-

baga pendidikan harus mampu 'membaca' secara cermat dan mengadakan perubahan seperlunya.

- b. Bagi para pengelola Madrasah Ibtidaiyah:
 - 1) Para pengelola Madrasah Ibtidaiyah sebaiknya selalu berinovasi dan berkreativitas untuk mengembangkan madrasahnyanya. Madrasah Ibtidaiyah sebaiknya dapat menunjukkan keunggulan kompetitif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat luas.
 - 2) Para pengelola MI sebaiknya mengedepankan profesionalisme dalam bekerja untuk memperkuat eksistensi madrasah.
- c. Bagi para pengelola *Islamic full-day school*:
 - 1) Para pengelola *Islamic full-day school* sebaiknya senantiasa meningkatkan inovasi dan kreatifitasnya untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya.
 - 2) Para pengelola *Islamic full-day school* sebaiknya meningkatkan proses kaderisasi dalam rangka memperluas pengembangan sekolah-sekolah Islam yang berkualitas.
- d. Bagi Departemen Agama:
 - 1) Departemen Agama sebaiknya berani menindak tegas terhadap

- pegawainya yang indisipliner dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Departemen Agama sebaiknya melakukan peremajaan pegawai secara signifikan dalam rangka optimalisasi kinerja.
 - 3) Departemen Agama sebaiknya memberi pembinaan kepada para guru secara rutin dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas kerjanya.
 - 4) Departemen Agama sebaiknya selektif dalam memberikan ijin pembukaan madrasah baru.
 - 5) Sebaiknya Depag mengambil langkah-langkah aktif dan strategis ketika menemukan gejala-gejala madrasah yang akan bubar. ***

SUMBER BACAAN

- Komariah, Aan dan Cepi Triatna (2005): *Visionary Leadership*. Jakarta, Bumi Aksara.
- al-Jumbulati, Ali dan Abdul Fatah (2002): *Perbandingan Pendidikan Islam* [terj.]. Jakarta, Rineka Cipta
- Furchan, Arif (1982): *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Surabaya, Usaha Nasional
- Dakir (2004): *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Depdiknas (2002): *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta, Ditjen Dikdasmen.
- Rochaety, Eti, dkk. (2005): *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Gay, L.R. (1981): *Educational Research*. Columbus, A Bell & Howell Company
- R.W, Griffin & Moorhead, G. (1996): *Organizational Behavior*. Boston, Houghton Mifflin Company.
- Usman, Husaini (2004): *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta, UNY.
- Steenbrink, Karel A. (1991): *Pesantren, Madrasah dan sekolah*. Jakarta: LP3ES
- Mahmud Yunus. (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya
- Miles, B.M., & Huberman, A.M. (1994). *An expended source book: qualitative data analysis 2nd edition*. London: SAGE Publication
- Mukhtar (2003): *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta, Misaka Galiza.
- Mulyasa (2003): *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung, Rosda.
- Ridwan (2005): *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Perubaban*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Robin, Stephen P. (1998): *Organizational Behavior*. Upper Sadle River, Prentice Hall Inc.
- Isaac, Stephen & William B. Michael (1982): *Handbook in Research and Evaluation 2nd Edition*. San Diego, Edits Publisher